

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek *rent-seeking* merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki, (Olson, 1982; Yustika, 2013:107).

Selanjutnya, *rent-seeking* ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Ananda, 2010).

Negara berkembang merupakan ladang yang sangat besar bagi pelaku *rent-seeking* terutama di negara kawasan Asia. Mushtaq Khan dan Jomo (2000), menjelaskan bagaimana praktek *rent-seeking* terjadi di Asia yang memberikan pengaruh yang sangat besar dan merusak pertumbuhan ekonomi salah satunya dalam bentuk korupsi. Ini membuktikan bahwa, praktek *rent seeking* terjadi pada negara-negara yang sedang mengalami pembangunan di Asia.

Rent-seeking di Asia banyak dilakukan oleh para politisi, pemerintah, Kapitalis (pemilik modal), para mafia, dan juga oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan yang kuat. Kesenjangan ekonomi yang sangat besar terjadi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah dan korupsi yang terus mengakar pada perekonomian negara kawasan Asia.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Kurnio dalam Mushtaq Khan dan Jomo (2000), menjelaskan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia tenggara bersifat semu atau tidak sebenarnya, tidak bersifat dinamis seperti yang terjadi di Inggris, Eropa, Amerika Serikat maupun Jepang dan kapitalisme yang terjadi didominasi oleh para pemburu rente. Disamping itu, ada pemimpin-pemimpin politik, penerus keluarga dan keluarga keraton yang terlibat dalam bisnis *rent-seeking*. Para pemimpin tersebut memburu proteksi kompetisi asing, konsesi, lisensi, hak monopoli dan subsidi pemerintah sehingga menumbuhkan dengan subur penyelewengan yang telah mengakar pada perekonomian.

Tindakan *rent-seeking* dalam bentuk korupsi yang tinggi menyebabkan pembangunan ekonomi di negara Asia mengakibatkan biaya tinggi (*high cost economy*), sehingga terjadi inefisiensi (Mushtaq Khan dan Jomo, 2000). Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumberdaya oleh para pejabat publik. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan tingginya biaya transaksi (*transaction cost*) dengan sistem birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik dalam pembangunan ekonomi. Biaya transaksi ini dapat berupa ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran atau dapat juga berupa biaya pencarian dan informasi, biaya negosiasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak dan biaya pengawasan (*monitoring*),

pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*) (Mburu, 2002:42). Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan berikut:

“*World Bank* (2008), memperkirakan bahwa lebih dari US\$10 miliar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi. Uni Afrika memperkirakan korupsi di wilayahnya sekitar 25% dari GDP-nya.”

USAID juga menyampaikan dalam publikasinya (*USAID Anticorruption Strategy*, 2005), Korupsi merusak pertumbuhan ekonomi dengan mendistorsi investasi publik dalam infrastruktur dan barang publik utama lainnya, menghalangi investasi asing langsung, mendorong perusahaan-perusahaan tua untuk beroperasi di sektor informal, melucuti hak-hak properti, mendistorsi ketentuan perdagangan, dan melemahkan aturan hukum.

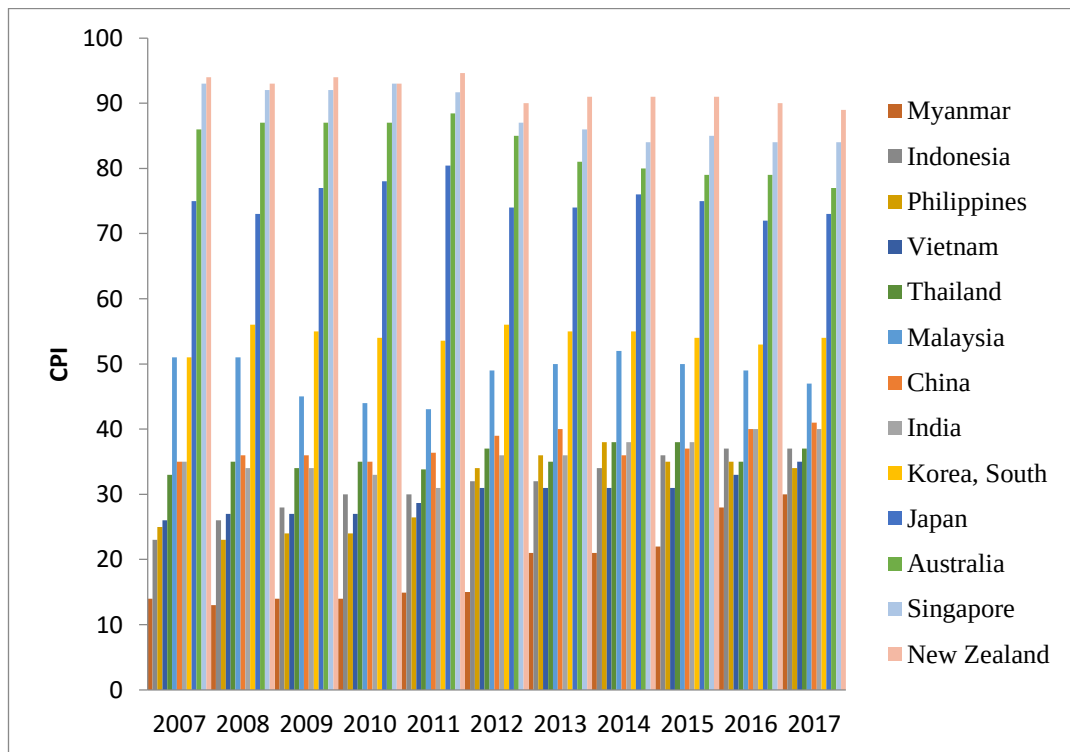
Berdasarkan laporan lembaga *Transparency International* pada *Corruption Perceptions Index* (CPI) pada grafik 1.1 negara ASEAN mengalami fluktuatif dalam skor CPI bahkan Singapura yang memiliki skor CPI tertinggi mengalami penurunan. Sedangkan negara yang terintegrasi dengan ASEAN+6 mengalami fluktuatif seperti Cina, India, dan Korea Selatan dan mengalami penurunan skor CPI seperti Jepang, Australia, dan New Zealand. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan korupsi masih belum mampu untuk dihindari di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang yang berada di kawasan ASEAN+6.

Laporan dari *Transparency International* menunjukkan pada tahun 2017 negara ASEAN hampir seluruhnya memiliki nilai skor korupsi dibawah 50 kecuali Singapura dengan skor sebesar (84). Laporan tersebut menjelaskan tingkat korupsi yang masih tinggi terjadi di negara ASEAN. Seperti yang terdapat pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa negara kawasan ASEAN masih memiliki tingkat

korupsi yang masih tinggi dibandingkan negara integrasi ASEAN +6 yang memiliki tingkat korupsi lebih rendah.

Grafik 1.1 Skor CPI (*Corruption Perception Index*) Tahun 2007-2017

ASEAN+6



Sedangkan zona integrasi ASEAN +6 mendapat skor diatas 50, seperti New Zealand (96), Australia (77), Japan (73), South Korea (54). Negara-negara tersebut menunjukkan nilai skor yang tinggi yang berarti tingkat korupsi negara semakin kecil. Akan tetapi terdapat dua negara yakni China (41) dan India (40) dengan skor dibawah 50, yang menandakan tingkat korupsi masih berisiko untuk meningkat.

Tabel 1.1 Peringkat dan Skor CPI (*Corruption Perception Index*) Tahun 2017

COUNTRY	RANK	CPI SCORE
New Zealand	1	96
Singapore	6	84
Australia	13	77
Japan	20	73
Korea, South	51	54
Malaysia	62	47
China	77	41
India	81	40
Indonesia	96	37
Thailand	96	37
Vietnam	107	35
Philippines	111	34
Myanmar	130	30

Sumber: *Transparency International 2017*

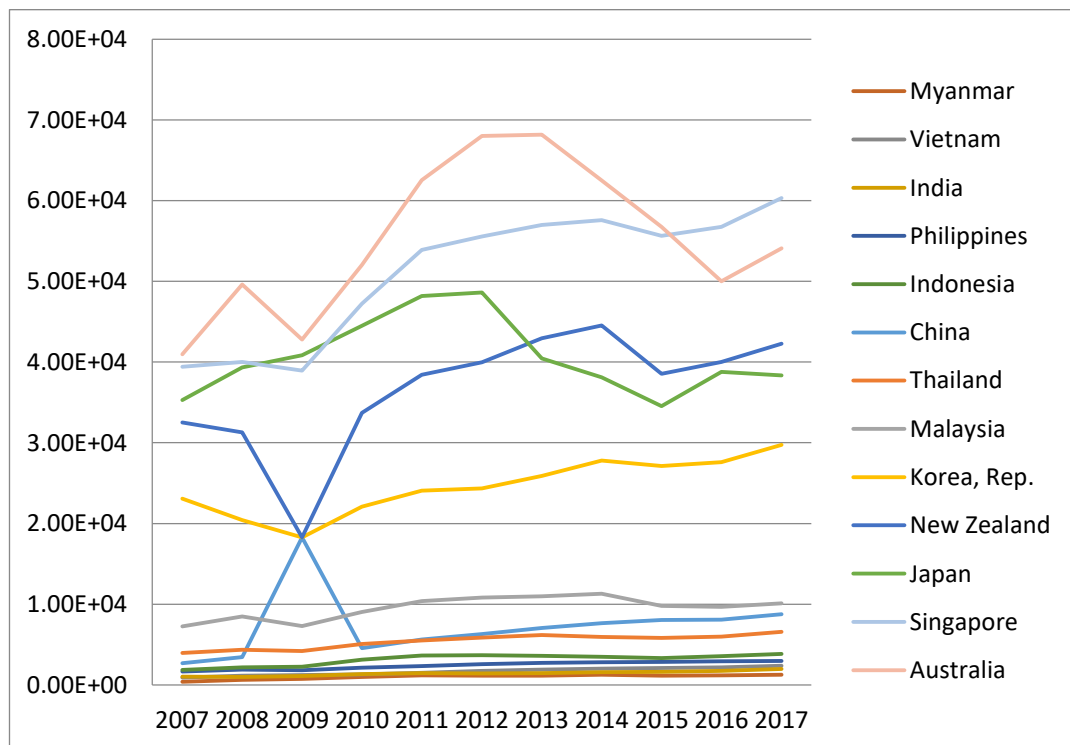
Berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara ASEAN+6, berdasarkan laporan dari *World Bank* pada grafik 1.2 menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 setelah mengalami fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan nilai GDP setiap negara pertahunnya.

Pada negara kawasan ASEAN mengalami kenaikan dalam pertumbuhan ekonominya berdasarkan GDP meskipun dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dibandingkan dengan negara integrasi ASEAN+6 yang

memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu rendahnya nilai pertumbuhan ekonomi negara ASEAN bersamaan dengan tingkat indeks persepsi korupsi yang sangat tinggi.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan GDP Tahun 2007-2017

ASEAN+6



Sumber: *World Bank 2017*

Berdasarkan grafik 1.2 dimana negara integrasi ASEAN +6 memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi secara bersamaan indeks persepsi korupsi negara kawasan ASEAN +6 hampir keseluruhan memiliki nilai skor dibawah 50, hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Praktek *rent seeking* diyakini telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buruknya perekonomian di Asia dengan munculnya persepsi korupsi yang semakin memburuk, karena praktek *rent seeking* telah menjamur dan tidak dapat dihindarkan dalam praktek ekonomi antar negara yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan hak kekuasaan yang dimiliki berusaha mengeluarkan modal yang minim dengan menyalahgunakan kekuatan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Oleh karena perubahan persepsi korupsi telah memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia termasuk pada pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN +6.

Persepsi korupsi yang bervariasi di kawasan Asia, bahkan sampai saat ini belum diketahui bagaimana persepsi korupsi dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN +6. Berdasarkan masalah yang dikemukakan ini, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN +6?
- b. Apa kebijakan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir persepsi korupsi di negara ASEAN +6?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pengaruh persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN +6.
- b. Mengemukakan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir persepsi korupsi di negara ASEAN +6.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN +6.
- b. Memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu.
- c. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan dalam menjaga perekonomian negara, khususnya dalam masalah persepsi korupsi.

3. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemerintah dalam menyelesaikan masalah persepsi korupsi dalam masa mendatang. Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dan menerapkan dalam sistem kelembagaan dengan tegas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para swasta dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga pengembangan bisnis dapat dilakukan secara bersih, sehingga keputusan diambil dapat mengurangi persepsi korupsi.

- c. Masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dan transparan terkait hubungan persepsi korupsi dengan pertumbuhan ekonomi melalui penelitian ini.